

PERBANDINGAN KONSEP KEKUASAAN DAN MODEL SISTEM POLITIK INTERNASIONAL ANTARA PERSPEKTIF REALIS DENGAN ISLAM¹

Studi Integrasi Islam dengan Ilmu Hubungan Internasional

Amri Hakim

Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Abdurrab, Pekanbaru

(Email: amri_hakim04@yahoo.com)

Abstract: the objectives of this study are to explore Islamic Idea about concept of power and model of international political system as Realist central theme, in order to guide Moslem International Relations Scholar knowing the meaning of their existence as Allah servant. This study also as first step to construct the practice of international relations based on Islamic Idea. The methode of this study is “the revelation guide science” by interprete Al Quran and Hadist, dialectic it with the mainstream theories and the reality of international relations, and then form the propositions of Islamic Idea, which are: power is the central concept of Islam Religion. Allah is the owner of absolute power on universe. Human in every level of social institution has the relative power. Human relatif power is limited by space, time and relational. Human relative power come from Allah as His delegation on the earth. The sources of human relative power are Wisdom, strength, wealth, and beautiful. Every human being who hold the relative power role as Allah agent for the merciful of universe. The relative power will be audited by Allah S.W.T. The model of international political system in Islamic Idea is World Society.

Keywords: Power, model of international political system, Realist, Islamic Idea

¹ Tema ini merupakan salah satu bab dalam rancangan buku Integrasi Islam dengan Ilmu Hubungan Internasional yang terdiri dari bab orientasi dan metodologi integrasi Islam dengan Ilmu Hubungan Internasional sebuah pendekatan konstruktivis, bab Ide islam terhadap isu-isu hubungan internasional, serta bab agenda dan strategi konstruksi praktek hubungan internasional dalam ide Islam.

Abstrak: Studi ini bertujuan untuk menggali Ide Islam tentang konsep kekuasaan dan model sistem politik internasional yang merupakan tema sentral dalam Perspektif Realis, sehingga memandu para penstudi muslim untuk mengenal hakikat kehambaannya, serta sebagai langkah awal konstruksi realitas interaksi antar negara berdasarkan Ide Islam. Adapun metode yang digunakan dalam studi ini adalah “wahyu memandu ilmu” dengan melakukan penafsiran terhadap Al Qur’an dan Hadist, mendialogkannya dengan teori dan realitas hubungan internasional, kemudian mengkonseptualisasikan proposisi-proposisi Ide Islam, berupa: Kekuasaan merupakan konsep sentral dalam Agama Islam. Allah adalah pemilik kekuasaan absolut atas sistem alam semesta. Manusia dalam segala level perannya memiliki kekuasaan relatif. Kekuasaan relatif manusia terbatas ruang, waktu dan relasional. Kekuasaan relatif yang dimiliki oleh manusia merupakan pendelegasian dari Allah, sebagai wakilNya di muka bumi. Sumber-sumber kekuasaan relatif manusia terdiri dari kebijaksanaan, keperkasaan, kekayaan ekonomi, dan ketampanan atau kecantikan. Semua manusia pemegang kekuasaan relatif merupakan agen dari Allah S.W.T. Kekuasaan relatif yang didelegasikan oleh Allah mempunyai tujuan untuk rahmat semesta Alam. Kekuasaan relatif akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah S.W.T. Model sistem politik internasional dalam Ide Islam adalah Masyarakat Dunia.

Kata kunci: kekuasaan, model sistem politik internasional, Perspektif Realis, Ide islam

Pendahuluan

Metodologi yang merupakan kesepakatan diantara para ilmuwan dalam sebuah disiplin ilmu tentang bagaimana menghasilkan teori-teori untuk menjelaskan, memprediksi dan mempreskripsi objek keilmuan, membentuk cara pandang dunia (*worldview*) para sarjana dalam disiplin ilmu tersebut. Dalam disiplin Ilmu Hubungan Internasional, dengan paradigma positivisnya, yang mengorientasikan para sarjana untuk mencari pola-pola umum (generalisasi) untuk menjelaskan perilaku negara dengan melepaskan subjektifitas atau nilai-nilai moral yang diyakininya, telah membuat para penstudi dan teori-teori yang dilahirkannya terlepas dari panduan moralitas.

Perspektif Realis misalnya, lahir sebagai kegelisahan dari para sarjana atas terjadinya dua perang dunia, mencoba untuk mencari penjelasan dan solusi dengan metode empirisme sejarah, menyimpulkan bahwa peperangan yang terjadi antar negara merupakan akibat dari perjuangan para negarawan dalam mengejar kekuasaan (*struggle for power*) atau meningkatkan keamanan nasionalnya, dan untuk menciptakan kestabilan hubungan antar negara (*order*), Kaum Realis menawarkan perimbangan kekuatan (*balance of power*).

Dominasi Perspektif Realis ini dalam Ilmu Hubungan Internasional, menurut kaum Post-Positivis akhirnya melahirkan cara pandang yang pesimis dan paranoid para negarawan dalam melihat keamanan nasionalnya, sehingga mengakibatkan pengalokasian anggaran belanja negara yang begitu besar untuk biaya pertahanan dan kebijakan-kebijakan yang *offensive* seperti *pre-emptive strike*.

Upaya untuk mengimbangi Perspektif Realis dalam Ilmu Hubungan Internasional sebenarnya telah dimulai dalam dua tahap: pertama oleh kelompok liberal awal yang disebut juga kaum utopis (Kantian) dengan asumsi moralitas umat manusia, kedua oleh kaum positifis (konstruktivis) yang mengkritik bahwa Ilmu Hubungan Internasional telah kehilangan tujuan esensialnya memecahkan masalah kemanusiaan dalam konteks global dan hanya terfokus dalam upaya pencarian generalisasi tanpa tujuan.

Kaum Liberal dan Post-positivis setidaknya sudah membawa Ilmu Hubungan Internasional ke dalam sebuah panduan moral sehingga para penstudi dan negarawan berfikir lebih optimis dan kooperatif. Permasalahan yang masih tersisa dari upaya pengimbangan terhadap metodologi positivis adalah karena dari awal penstudi Ilmu Hubungan Internasional telah dipisahkan dari nilai-nilai moralitas atau agama (objektif), maka *worldview* dari para sarjananya menjadi sekuler, dan kegiatan studi tidak mendorong para sarjana untuk mengenal hakikat dirinya sesuai dengan ajaran agama.

Kondisi ini tentunya menjadi fakta yang miris bagi seorang muslim, karena ketika kita melihat ilmu pengetahuan atau *science* sebagai sebuah subsistem pendidikan dari perspektif Islam, kita akan menemukan disorientasi dan diskoneksi antara tujuan pendidikan dalam Islam dengan realitas ketidakkenalan hakikat diri sebagai hamba Allah para penstudi Ilmu Hubungan Internasional muslim.

Pemikiran Prof. Dr. Muh. Naquib al- Attas (1984) berikut ini kiranya perlu menjadi acuan untuk mengevaluasi apakah Ilmu Hubungan Internasional sudah menuju kepada visi pendidikan menurut Islam:

Tujuan pendidikan dalam Islam adalah sebagai pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan kedalam manusia tentang tempat-tempat yang tepat bagi segala sesuatu di dalam tatanan wujud, sehingga hal ini membimbing kearah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud tersebut.

Berangkat dari kondisi diatas, maka studi ini bertujuan untuk menggali Ide Islam tentang konsep kekuasaan dan model sistem politik internasional yang merupakan tema sentral dalam Perspektif Realis sehingga memandu para penstudi muslim untuk mengenal hakikat kehambaannya, serta sebagai langkah awal konstruksi realitas interaksi antar negara berdasarkan Ide² Islam. Adapun metode yang digunakan dalam studi ini adalah “wahyu memandu ilmu”

² Nina Tannenwald mengidentifikasi empat tipe ide berupa ideologi, norma, keyakinan sebab akibat dan resep kebijakan, dalam Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hal 373.

dengan melakukan penafsiran terhadap Al Qur'an dan Hadist, mendialogkannya dengan teori dan realitas hubungan internasional, kemudian mengkonseptualisasikan proposisi-proposisi Ide Islam.

Pembahasan

A. Posisi konsep kekuasaan dalam Realis dan Islam

Perspektif Realis menempatkan kekuasaan sebagai konsep utama di dalam politik internasional, seperti yang diargumenkan oleh Hans J. Morgenthau (1948, p.13) bahwa pola-pola aktivitas negara atau politik internasional dibentuk oleh perjuangan negara mengejar kekuasaan sepanjang sejarah. Apapun Tujuan akhir yang ingin dicapai baik pencarian kebebasan, keamanan, kesejahteraan, ataupun kekuasaan itu sendiri, semuanya mensyaratkan pengejaran kekuasaan karena dengan kekuasaan lah semua itu bisa dicapai.

Konsep kekuasaan juga menempati posisi sentral dalam sistem kepercayaan Islam (Rukun Iman) yang merupakan fondasi berdirinya agama ini. Syarat utama menjadi muslim adalah pengakuan dan pelafazan kalimat syahadat yang bermakna tiada Tuhan selain Allah. Dalam konteks ini, konsep kekuasaan *inherent* dengan konsep Tuhan yang merepresentasikan struktur atau posisi Maha tinggi di atas sistem alam semesta. Maknanya dapat digali dengan pertanyaan “Apakah Tuhan itu?”, sehingga menunjukkan fungsi atau peran dari struktur (posisi) tersebut, Tuhan adalah Zat yang menciptakan (Al Baqoroh: 21-22), memelihara (An Nisa: 132), menghidupkan kembali (Al Baqarah: 259-260) dan yang menghakimi Alam semesta (Al an'am: 62). Fungsi dan peran dari Tuhan tersebut pada hakikatnya merupakan perwujudan dari Kekuasaan Allah atas sistem alam semesta. Artinya ketika seseorang menjadi muslim, pertama kali dia harus mengakui bahwa Allah adalah pemilik segala kekuasaan atau Allah Maha Kuasa atas sistem alam semesta.

Posisi sentris kekuasaan dalam sistem kepercayaan Islam juga tertuang dalam Al-qur'an, Surat Al Fatihah, ayat pertama ³.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

³ Berdasarkan pendapat Iman Malik (Al-Maraghi: 1996, I: 27), dan Hadist Qudsi HR. Muslim kitab Shalat, bab 11, no.395, 2/324.

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam

Pemahaman ini dapat kita tarik dari pernyataan-pernyataan berikut ini: pertama, Surah Al-Fatihah merupakan intisari atau induk dari surah-surah dalam Al-Qur'an. Kedua, urutan ayat di dalam surat menunjukkan susunan signifikansinya. Artinya Surat Al-Fatihah merupakan surah yang terpenting di dalam Al-qur'an dan ayat pertama dari surat Al-Fatihah adalah ayat yang terpenting di dalamnya.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa konsep kekuasaan berada pada posisi sentris dalam Perspektif Realis untuk menjelaskan realitas interaksi antar negara, begitupun dalam Ide Islam, konsep kekuasaan menempati posisi sentris tidak hanya dalam menjelaskan sistem alam semesta tetapi juga interaksi antar negara yang merupakan sub sistemnya.

B. Perbandingan Defenisi konsep kekuasaan antara Realis dengan Islam

Morgenthau mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan mengontrol pikiran dan tindakan aktor lain untuk mewujudkan kepentingan. Ketika menyandingkan konsep kekuasaan Realis ini dengan konsep kekuasaan dalam Islam, ada beberapa hal yang perlu dikritisi: pertama, defenisi Realis menyiratkan ketergantungan si aktor, karena untuk mencapai kepentingannya dia harus mampu mengontrol pikiran dan tindakan aktor lainnya. Dalam Islam, Allah sebagai Tuhan dari alam semesta tidak tergantung kepada aktor lainnya (Al-Ikhlâs: 4), bahkan Allah menyatakan jika Dia berkehendak cukup baginya dengan mengatakan "jadilah" (Al-Baqoroh: 117).

Ketidaksesuaian indikator konsep kekuasaan antara Realis dengan sifat-sifat Allah tersebut mensyaratkan dilakukannya reformulasi konsep kekuasaan dalam Islam sebagai berikut:

- a. Karena Allah tidak tergantung kepada apa dan siapa pun dan karena bagi Allah cukup dengan menyatakan "jadilah" dalam mewujudkan kehendaknya, maka frase "kemampuan mengontrol pikiran dan tindakan orang lain" harus dihilangkan dari defenisi kekuasaan dalam konteks kekuasaan Allah, menjadi "kemampuan untuk mewujudkan kehendak". Sifat kekuasaan Allah tersebut diabstraksikan dengan konsep kekuasaan absolut, yang merupakan dimensi kekuasaan pertama dalam Perspektif Islam. Kekuasaan absolut adalah sumber dari segala kekuasaan yang dimiliki oleh Zat yang menciptakan,

memelihara, menghidupkan kembali dan menghakimi alam semesta yang tidak terbatas ruang dan waktu.

- b. Karena manusia dalam mewujudkan kehendaknya tergantung kepada individu lain, maka defenisi kekuasaan dari Realis di atas berlaku dalam konteks kekuasaan yang dimiliki oleh manusia, dan diabstraksikan dengan konsep kekuasaan relatif yang merupakan dimensi kekuasaan kedua dalam Perspektif Islam. Kekuasaan relatif adalah kekuasaan yang didelegasikan oleh pemilik kekuasaan absolut kepada manusia (Al Baqoroh: 30, Ali Imran: 26) dalam berbagai sumber kekuasaan berupa kebijaksanaan (Al baqoroh: 251, An Nisa: 54), keperkasaan (Al Baqoroh: 247), kekayaan ekonomi (An Nisa: 34), dan ketampanan atau kecantikan (Yusuf: 31) yang terbatas ruang dan waktu serta bersifat relasional atau tergantung dengan potensi sumber kekuasaan yang dimiliki oleh aktor lain⁴. Berbeda dengan Realis yang menekankan sumber kekuasaan kepada material berupa kekuatan militer atau ekonomi⁵, sumber kekuasaan dalam Islam merupakan percampuran antara Realis dan Konstruktivis yang menekankan tidak hanya pada kekuatan militer dan ekonomi tetapi juga kepada kekuatan ideasional atau kebijaksanaan.

Sama dengan ide liberal dimana pendelegasian kewenangan oleh rakyat kepada pejabat politik mensyaratkan tujuan dan pertanggung jawaban dari pejabat politik, dalam ide Islam, kekuasaan yang didelegasikan oleh Allah, S.W.T. kepada seluruh umat manusia juga mempunyai tujuan dan norma yang terangkum dalam ajarannya (Ide) serta akan dimintai pertanggung jawabannya⁶.

C. Perbandingan model sistem politik internasional antara Realis dengan Islam

Pembahasan tentang perbandingan model sistem politik internasional antara Realis dengan Islam ini akan dimulai dengan pemaparan Barry Buzan (2004, p.6-7) tentang tiga model sistem politik internasional dari *English School*, yaitu:

1. Sistem internasional (Hobbes/Machiaveli/Realisme), menekankan pada politik kekuasaan antar negara dan memosisikan struktur serta proses anarki sebagai asumsi

⁴ Walter Carsnaes, dkk, Handbook Hubungan Internasional, Nusa media, Bandung, 2013, hal 373.

⁵ *Op.,cit*, hal 372.

⁶ Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail al Bukhari, Sahih al Bukhari, Juz II, Beirut, 1987, hal 848. Dalam http://eprints.walisongo.ac.id/286/3/084211005_Bab2.pdf.

dasar teorinya. Dalam model ini negara merupakan aktor utama (*state centrist*) dalam sistem internasional, dimana negara merupakan pelaku dan sasaran perilaku. Konsekuensinya adalah partisipan dalam politik dunia hanya terdiri dari para pelaksana politik luar negeri pemerintah berbagai negara, yaitu diplomat atau para jenderal. Semua kelompok lain yang berkepentingan dengan politik dunia menyampaikan kepentingannya melalui perantara pemerintah.

2. Masyarakat internasional (Grotius/Rasionalisme), konsep ini berbicara mengenai pelebagaan nilai-nilai bersama, identitas antar negara dan memposisikan penciptaan serta pemeliharaan nilai-nilai bersama, aturan dan lembaga sebagai tema sentral teori hubungan internasional. Kesamaan model ini dengan sistem internasional terletak pada penekanannya pada unit negara.
3. Masyarakat dunia (Kant/Revolutionism) menekankan pada individu, organisasi non pemerintah, dan tentunya populasi dunia, sebagai keseluruhan fokus identitas dan pengaturan masyarakat global, dan memposisikan sistem transnasional sebagai tema sentral teori hubungan internasional.

Robert Jackson dalam bukunya *Quasi-States: Sovereignty, International Relations and The Third World* (2000:169-78) membedakan ketiga tradisi dalam Mazhab English tersebut berdasarkan unit prioritas tanggung jawabnya, pertama, Realisme memberikan prioritas pada tanggung jawab nasional, rasionalisme memberikan prioritas pada tanggung jawab internasional, dan rasionalis (*cosmopolitan*) memberikan prioritas pada tanggung jawab kemanusiaan.

Pemaparan Barry Buzan dan Robert Jackson di atas memberikan dua indikator untuk menentukan model sistem politik internasional, pertama, aktor yang membentuk sistem internasional, kedua prioritas tanggung jawabnya. berangkat dari hal tersebut maka, model sistem politik internasional dalam Perspektif Realis adalah sistem internasional karena mengargumenkan negara sebagai aktor utama dan prioritas tanggung jawab nasional. Model sistem politik internasional dalam Ide Islam merupakan percampuran antara masyarakat internasional dan masyarakat dunia, dimana Allah mendelegasikan kekuasaannya kepada seluruh umat manusia atau populasi dunia (Al Baqoroh: 30) dan juga Allah menekankan negara sebagai aktor kekuasaan (Ali Imran: 26, Ali Imran: 189), adapun prioritas tanggung jawab dalam Ide Islam adalah kepada semesta alam (Al Anbiya: 107).

Akhirnya dalam Ide Islam dapat disimpulkan bahwa semua manusia dalam segala level organisasi, seperti keluarga, pendidikan, kelompok adat, organisasi bisnis, negara, dan organisasi antar negara, organisasi transnasional, ataupun manusia dalam level individu adalah agen untuk mewujudkan rahmat bagi semesta alam, yang tentunya peran keagenan tersebut hanya akan dijalankan oleh manusia-manusia yang meyakini Allah S.W.T sebagai pemilik kekuasaan tertinggi dan Nabi Muhammad S.A.W. sebagai utusanNya (Umat Islam). Berdasarkan ukuran-ukuran dari model sistem politik internasional dari *English School* di atas, maka model sistem politik internasional dalam Ide Islam diabstraksikan dengan konsep Masyarakat Dunia⁷.

D. Kesimpulan

Dari pemaparan bab-bab di atas dapat ditarik Proposisi konsep kekuasaan dan model sistem politik internasional dalam Ide Islam sebagai berikut:

1. Kekuasaan merupakan konsep sentral dalam Agama Islam.
2. Allah adalah pemilik kekuasaan absolut atas sistem alam semesta.
3. Manusia dalam segala level perannya memiliki kekuasaan relatif.
4. Kekuasaan relatif manusia terbatas ruang, waktu dan relasional.
5. Kekuasaan relatif yang dimiliki oleh manusia merupakan pendelegasian dari Allah, sebagai wakilNya di muka bumi.
6. Sumber-sumber kekuasaan relatif manusia terdiri dari kebijaksanaan, keperkasaan, kekayaan ekonomi, dan ketampanan atau kecantikan.
7. Semua manusia pemegang kekuasaan relatif merupakan agen dari Allah S.W.T.
8. Kekuasaan relatif yang didelegasikan oleh Allah mempunyai tujuan untuk rahmat semesta Alam.
9. Kekuasaan relatif akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah S.W.T.
10. Model sistem politik internasional dalam Ide Islam adalah Masyarakat Dunia.

⁷ Ukuran dari konsep masyarakat dunia antara Ide Islam dengan Kantian, sedikit berbeda karena Islam juga mengakui negara sebagai aktor dalam sistem politik internasional dan prioritas tanggung jawab tidak hanya kepada kemanusiaan tetapi juga kepada alam semesta yang juga akan mempengaruhi kesejahteraan seluruh umat manusia atau warga dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Buzan, Barry (2004), *From International to World Society? English School Theory and Social Structure of Globalisation*, Cambridge University Press, New York.

Carsnaes, Walter, dkk, (2013) *Handbook Hubungan Internasional*, Nusa media, Bandung.

Jackson, Robert dan Georg Sorensen, (2013) *Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Morgenthu, Hans J, (1948) *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, Alfred A. Knopf, New York.

Muslim, HR. kitab Shalat, bab 11, no.395, 2/324.

Naquib al- Attas, Muh, (1984) *Konsep Pendidikan dalam Islam*, Mizan, Bandung.

Taufiq, Mohamad, Quran in Ms Word, <http://taufiqproduct.com>

http://eprints.walisongo.ac.id/286/3/084211005_Bab2.pdf.